

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
1. Tinjauan Pustaka	9
2. Kerangka Konsep	23
F. Metode Penelitian	26
BAB II SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG BERSTATUS KREDIT	
A. Pengertian Perusahaan Pembiayaan, Jaminan Fidusia dan Dasar Hukumnya	31
B. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Dalam Mendaftarkan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Berstatus Kredit	49
C. Teori Kepastian Hukum Sebagai Tujuan Hukum	52
D. Teori Sanksi Administrasi	59

E. Teori Kewenangan	64
F. Teori Efektifitas Hukum	75
 BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Diterapkannya Sanksi Administrasi Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Terhadap Perusahaan Pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Berstatus Kredit	85
B. Akibat Hukum Bagi Debitur dan FIF Group Cabang Pontianak Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Berstatus Kredit Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia	110
C. Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Dalam Menerapkan Sanksi Administrasi Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Terhadap Perusahaan Pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Berstatus Kredit	113
 BAB IV P E N U T U P	
A. Kesimpulan	117
B. S a r a n	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN